



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : RSJD SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PUJI HARTATI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PENDIDIKAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
3. NHK : 400199

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.305.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 675 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 607 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
3. Tanah Seluas 2700 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah Seluas 261 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 600.000.000

1. MOBIL, SUZUKI MPNP/MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOBIL, MAZDA MAZDA2 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 502.054.634



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.407.054.634
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.407.054.634

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.